

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK TAHUN 2023 DALAM PEMUNGUTAN PKB DI BAPENDA PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kota Bandar Lampung)

Oleh

VANIA DAMAYANTI

Kebijakan keringanan pajak tahun 2023 merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor (PKB). kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap tingginya angka tunggakan PKB dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan pelaksanaan kebijakan berdasarkan lima indikator ketepatan kebijakan menurut Nugroho Riant (2020), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan telaah terhadap dokumentasi tertulis. Analisis dilakukan terhadap kelima ketepatan muatan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keringanan PKB telah terpenuhi dalam indikator ketepatan muatan kebijakan dan ketepatan pelaksana kebijakan. Namun masih menghadapi kendala dalam indikator ketepatan target kebijakan, lingkungan kebijakan, dan proses kebijakan. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kesadaran wajib pajak, kualitas jaringan yang buruk, serta kurangnya intensitas sosialisasi kebijakan. Kebijakan keringanan pajak di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung berhasil mendorong peningkatan penerimaan daerah, namun belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Keringanan Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE 2023 TAX RELIEF POLICY IN PKB COLLECTION AT BAPENDA OF LAMPUNG PROVINCE (Study in Bandar Lampung City)

By

VANIA DAMAYANTI

The 2023 tax relief policy is one of the fiscal policies implemented by the Provincial Government of Lampung in the collection of Motor Vehicle Tax (PKB). This policy was introduced in response to the high rate of PKB arrears and the low level of taxpayer compliance. This study aims to analyze the accuracy of the policy implementation based on the five policy accuracy indicators proposed by Nugroho Riant (2020), as well as to identify the factors that hinder its implementation. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews and review of written documentation. The analysis focuses on the five aspects of policy accuracy: content accuracy, implementer accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The results show that the PKB tax relief policy has met the indicators of content accuracy and implementer accuracy. However, it still faces challenges in the indicators of target accuracy, policy environment, and policy process. These challenges are due to limitations in digital infrastructure, low taxpayer awareness, poor network quality, and lack of intensive policy dissemination. The tax relief policy in Lampung Province, particularly in Bandar Lampung City, has successfully contributed to increased regional revenue, but has not yet significantly improved overall taxpayer compliance.

Keywords: Motor Vehicle Tax (PKB), Public Policy, Regional Tax, , Tax Relief